

MEMO HUKUM

IVAN SETIAWAN

PERANAN PERUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI SEBAGAI PENJAMIN KREDIT BANK



KK -
Per. 2201/96
Set
p

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

**PERANAN PERUM
PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI
SEBAGAI PENJAMIN KREDIT BANK**



MEMO HUKUM

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Pembimbing,

**Djasadin Saragih, S.H., LL.M.
NIP. 130445322**

Penyusun,

**Ivan Setiawan
NIM. 039213636**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a. Peranan Perum PKK sebagai lembaga jaminan kredit sesungguhnya sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan kredit oleh dunia perbankan maupun di luar dunia perbankan sebagaimana maksud dan tujuan didirikannya. Dalam pelayanannya bagi koperasi Perum PKK memberikan prosedur pelayanan yang ditetapkan sesuai prinsip-prinsip penanggungan. Penetapan agunan yang dimintakan oleh pihak bank dirasa Perum PKK bukan suatu keharusan bagi koperasi karena lemahnya posisi koperasi dalam menyediakan agunan yang dimintakan oleh pihak bank dan ini disadari sepenuhnya oleh pihak bank.
- b. Kegagalan usaha yang dapat menyebabkan koperasi pailit dan tidak dapat memnuhikewajibannya pada pihak bank dapat dinyatakan sebagai wanprestasi oleh pihak bank. Perum PKK sebagai penanggung memenuhi kewajiban yaitu membayar klaim kerugian pada pihak bank sesuai perjanjian penanggungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pencairan agunan koperasi secara langsung dapat terjadi jika agunan tersebut berupa cash collateral, sedangkan non cash collateral harus mendapat persetujuan dari Perum PKK.

2. Saran.

- a. Perlunya Perum PKK meningkatkan mutu pelayanan yang

disertai dengan lebih selektifnya dalam menerima permohonan penjaminan kredit. Bagi koperasi yang mempunyai usaha yang prospektif perlu adanya dorongan dan pembinaan Perum PKK guna meningkatkan daya saing dalam masyarakat.

- b. Adanya pengaturan yang lebih jelas lagi mengenai agunan yang diberikan koperasi kepada Perum PKK dirasa perlu guna kepentingan baik Perum PKK maupun pihak bank. Hal ini guna mencegah agar tidak timbul masalah sehingga perlu dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perjanjian tersebut.